

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus, Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,
(Yogyakarta : Gadjah Madah University Press,2005)

Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994)

Hadjon, Phillipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta
: Gajah Mada University.1993).

Indarjit, Richardus Eko.*Membangun Aplikasi E-Goverment*, (Jakarta: Elex
Media Komputindo 2002).

_____,*E-Government strategi pembangunan dan pengembangan system
pelayanan publik berbasis digital* , (Yogyakarta:Andi Offset,2004)

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Layak (AAUPB)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999)

Khoirul, Anwar dan Asianti Oetojo S, *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2011).

Lijan poltak, Sinambela.*Reformasi Pelayanan Publik*. (Jakarta : Bumi Aksara
. 2001.)

Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*,
(Yogyakarta: Liberty, 2006)

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : UPP AMP
YKPN, 2005.)

- Mursitama dkk, Tirta Nugraha. 2010. *Reformasi Pelayanan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota* (Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru), Jakarta : MTI.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengamar Hukum Perizinan*, disunting oleh Phillipus M. Hadjon.(Surabaya:1993)
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana)
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Gentra Publishing, 2009).
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006)
- Rianto, Budi. *Polri & Aplikasi e-Government dalam Pelayanan Publik*,(Surabaya : Putra Media Nusantara, 2012)
- Salim ,Amrullah. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. (Jakarta: Gramedia,1986)
- Sirajjudin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Parsipasi dan Keterbukaan Informasi*, (Malang: Setara Press 2011)
- Soemitro, Hanitijo , Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*(Jakarta: Rajawali Pers, 1985)
- Sutedi,Adrian. *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Utrecht.E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957).

Versteden ,C.J.N., *Inleiding Algemeen Berstuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk

Willink, Alphen aan den Rij, 1984.

Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekt Manajemen Pemerintahan Daerah*,

(Bandung: Fokusmedia,2003),

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

Berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegritas secara Elektronik (OSS).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa

Tengah.

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. JURNAL

Effendi, Taufiq. *Tingkatan Pelayanan Publik. Dalam Suara Pembaruan*,
Jumat, 9 Mei 22 Oktober 2003.

D. ARTIKEL ILMIAH

Basah,S jachran. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanks Hukum Administrasi*,
Makalah pada Penataran Hukum Administrasi Negara dan Lingkungan
di Fakultas Hukum Unair, (Surabaya:1995)

E. WEBSITE

<http://rilis.id/perizinan-di-indonesia-masih-berbelit-belit.html>, diakses pada
tanggal 20 November 2018.

<http://jabarekspres.com/2018/tindak-tegas-oknum-perizinan/>, diakses pada
tanggal 19 Desember 2018.

[https://bisnis.tempo.co/read/1082844/dengan-oss-menteri-darmin-janjikan-
urus-izin-usaha-30-menit](https://bisnis.tempo.co/read/1082844/dengan-oss-menteri-darmin-janjikan-urus-izin-usaha-30-menit), diakses pada tanggal 20 November 2018.

[http://koransindo.com/page/news/20160314/5/66/Pengurusan_Izin_Usaha_La
mbat](http://koransindo.com/page/news/20160314/5/66/Pengurusan_Izin_Usaha_La
mbat),diakses pada tanggal 19 Desember 2018.

[http://jateng.tribunnews.com/2018/10/09/juli-2018-nilai-investasi-masuk-
jawa-tengah-mencapai-276-triliun](http://jateng.tribunnews.com/2018/10/09/juli-2018-nilai-investasi-masuk-
jawa-tengah-mencapai-276-triliun), diakses pada 19 November 2018.

